

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Tri kristiayani, C. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika).
- Yayasan Lembaga Konsumen. (1981). Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undnag-Undang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.
- Abbas, N. (1996). Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya. Makalah. Ujungpadang: Elips Project.
- Hondius. (1976). Konsumentenrecht. Dalam Mariam Darus Badruzaman.
- Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.
- Hadjon & Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.
- Halim Barkatullah, A. (2016). Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Marpi, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Radbruch, G. (1950). The Legal Philosophies of Lask, Radburch, and Dabin. Massachusetts: Harvard University Press.
- Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama.
- Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, P. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2003). Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Oka Setiawan, I. (2018). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. & Tjirosudibio, R. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sriwidodo, J. & Kristiawanto. (2021). Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Kepel Press.
- Darus Badruzaman, M. (1995). Bab-Bab Tentag Credietverband, Gadai dan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. (1978). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- Yahya Harahap, M. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Rahmadi, T. (2011). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.
- Airi, N. (2012). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joses Sembiring, J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia.
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noone, M. (1997). *Mediation: Essensial Legal Skill*. Great Britain: Cavendish Publishing.
- D York, S. (1996). *Practical ADR*. London: FT Law and Tax Publisher.
- Pusat Pengkajian Hukum & Jakarta Initiative. (2003). Lokakarya Terbatas Mengenai Teknik Mediasi. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Ul Hosnah, A., Seno Wijanarko, D., & P. Sibuea, H. (2021). Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Hanitjo Soemitro, R. (1982). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud Marzuki, P. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sukmaningsih, I. (2000). *Harapan Segar dari Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Sularsi. (2001). *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Lika Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Kanowitz, L. (1985). *Alternative Dispute Resolution*. Minnesota: St Paul, Minnesota USA West Publishing Co.,.
- Rao, P. C. & Shenffield, W. (2004). *Alternatives to Litigation in India*. Delhi: Universal Law Publishing Co. Ltd.
- Lovenheim, P. & Guerin, L. (2004). *Mediation, Don't Litigate, Strategies for Succesful Mediation*. Missouri: NOLO.
- Widjaja, G. & Yani, A. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Apartemen dan Kawasan Pemukiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen.

C. Jurnal

Syendy A. Korompis. (2018). Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerinth Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Lex Privatum*. Vol 4 Nomor 1.

Mahmud Marzuki, P. (1997). The Need for the Indonesian Economic Legal Framework. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Edisi IX.

Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai. *Jurnal Private Law*. Vol. 9 Nomor 1.

D. Lain-lain

Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan. (1982). *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan.

Badan Pusat Statistik. (2010). *Sensus Penduduk 2010*. Diakses dari [Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://sensus.bps.go.id). Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

Nurcholis Anhari Lubis. (2010). Surabaya, *Ladang Subur Apartemen*. Diakses dari [Surabaya, Ladang Subur Apartemen \(viva.co.id\)](https://viva.co.id). Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

Abdullah Azzam. (2023). *Investasi Properti di RI Tembus Rp27,8 triliun, Tertinggi Keempat*. Diakses dari [Investasi Properti di RI Tembus Rp27,8 triliun, Tertinggi Keempat! \(bisnis.com\)](https://bisnis.com). Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

Webinar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. (2020). *Hukum Apartemen dalam Praktek di Indonesia Menurut Pakar dan Akademisi FH UKI*. Diakses dari [Hukum Apartemen dalam Praktek di Indonesia Menurut Pakar dan Akademisi FH UKI - Bisnis Tempo.co](https://bisnis.tempo.co). Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

Ensiklopedia Dunia. (2019). Penyelesaian Sengketa. Diakses dari [Penyelesaian sengketa \(stekom.ac.id\)](https://penyelesaian.sengketa.stekom.ac.id). Diakses pada tanggal 10 September 2023.

Aman Sinaga. (2004). Makalah Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen.